**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.07.IZ.01.02 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN KEPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.04-IZ.01.02 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN
VISA DAN IZIN KEIMIGRASIAN BAGI WISATAWAN
LANJUT USIA MANCANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Bahwa dalam rangka merespon peningkatan investasi dari wisatawan lanjut usia mancanegara di Indonesia maka perlu mengubah Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-IZ.01.02 Tahun 1998 tentang Pemberian Visa dan Izin Keimigrasian Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara nomor 3474);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3561);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.04-IZ.01.02 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN VISA DAN IZIN KEIMIGRASIAN BAGI WISATAWAN LANJUT USIA MANCANEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-IZ.01.02 Tahun 1998 tentang Pemberian Visa dan Izin Keimigrasian Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara dari negara-negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belgia, Belanda, Brasilia, Brunai Darussalam, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Emirat Arab, Estonia, Finlandia, Hongaria, India, Inggris, Irlandia, Iran, Islandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Kuwait, Liechtenstein, Luxemburg, Maladewa, Malaysia, Malta, Mesir, Monaco, Norwegia, Oman, Perancis, Philipina, Polandia, Portugal, Qatar, Rusia, Saudi Arabia, Selandia Baru (New Zealand), Singapura, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Taiwan, Thailand dan Yunani.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 31 Agustus 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

HAMID AWALUDIN